

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam proses pembangunan perekonomian suatu negara, maka perlu dikuatkan sektor – sektor yang bisa menopang perekonomian negara tersebut dalam hal ini sering dikaitkan dengan sektor Industri. Untuk menciptakan suatu industri yang berkembang dan maju maka harus ada campur tangan didalamnya (pemerintah dan swasta) agar industrialisasi bisa berjalan dengan semestinya. Menurut Arsyad (2010:442), bahwa “pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor - sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Sektor industri dalam hal ini memiliki peranan penting untuk memajukan perekonomian suatu negara dan juga bisa menjadi sektor andalan. Produk-produk dan barang yang dihasilkan dari industri tersebut biasanya memiliki nilai dasar tukar (*terms of trade*)”. Biasanya barang-barang yang dihasilkan sektor industri ini, mempunyai daya tahan yang baik dan bisa juga menjadi barang - barang yang digunakan setiap hari maupun barang - barang yang dipakai untuk menunjang *fashion* seseorang, serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dari sektor-sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki nilai jual yang sangat baik dan mempunyai margin keuntungan yang lebih menggiurkan dari sektor lainnya. Dalam hal ini mayoritas penduduk memang lebih sering memakai produk yang diha

-silkan dari sektor industri tersebut dari pada sektor lainnya, untuk pelaku bisnis (produsen, pedagang, dan investor) lebih suka membeli atau memasarkan produk yang dihasilkan dari sektor industri dikarenakan produk yang dihasilkan memiliki daya tahan yang lebih lama dan margin keuntungan yang lebih besar. Karena kelebihan - kelebihan sektor industri yang telah dipaparkan, maka industrialisasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah pembangunan di negara – negara berkembang. Kebijakan yang ditempuh seringkali dipaksakan, dalam arti hanya sekedar meniru pola kebijakan pembangunan di negara - negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti masalah ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecukupan modal dan sebagainya. (Dumairy, 1996:227-228).

Menurut Simanjuntak (2002:13) mengatakan bahwa “dalam proses pembangunan ekonomi, sektor industri dijadikan prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan penting sebagai sektor pemimpin (*leading sector*), yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor – sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja”.

Menurut Teguh (2010:4), Pengertian industri adalah “kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis yang mempunyai nilai tambah seperti mengelola

barang mentah menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi yang lebih bernilai dengan tujuan pembentukan pendapatan”.

Sedangkan Menurut Tambunan (2003:249), “Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri”.

Tenaga kerja adalah penduduk yang mencapai batas usia kerja dalam hal ini penduduk tersebut sudah bisa menghasilkan barang maupun jasa untuk mendapatkan hasil berupa pendapatan dengan hasil atau pendapatan tersebut diharapkan penduduk tersebut sudah bisa mencukupi kehidupannya atau kebutuhannya sendiri maupun kehidupan keluarganya.

Menurut Subri (2003:59), tenaga kerja adalah “penduduk dalam usia kerja (berusia 15 - 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut”.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki batas usia kerja dan dari mereka ada yang sedang bekerja atau melakukan kegiatan bekerja sedangkan yang lainnya ada yang melakukan kegiatan selain bekerja misalnya melanjutkan dalam bidang akademik dengan cara bersekolah maupun menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan ada pula angkatan kerja yang sudah lulus menempuh pendidikannya tetapi sedang mencari pekerjaan dan yang lainnya lagi

sedang tidak bekerja atau tidak melanjutkan sekolah dan mereka tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran meskipun mereka sudah memasuki batas usia kerja.

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu upaya untuk mencari penduduk yang sudah melewati batas usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang tidak bekerja untuk bekerja di suatu sektor, dan calon tenaga kerja tersebut mempunyai motivasi yang bagus untuk bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan kemampuan yang di butuhkan oleh sektor tersebut maupun keahlian yang dibutuhkan oleh sektor tersebut.

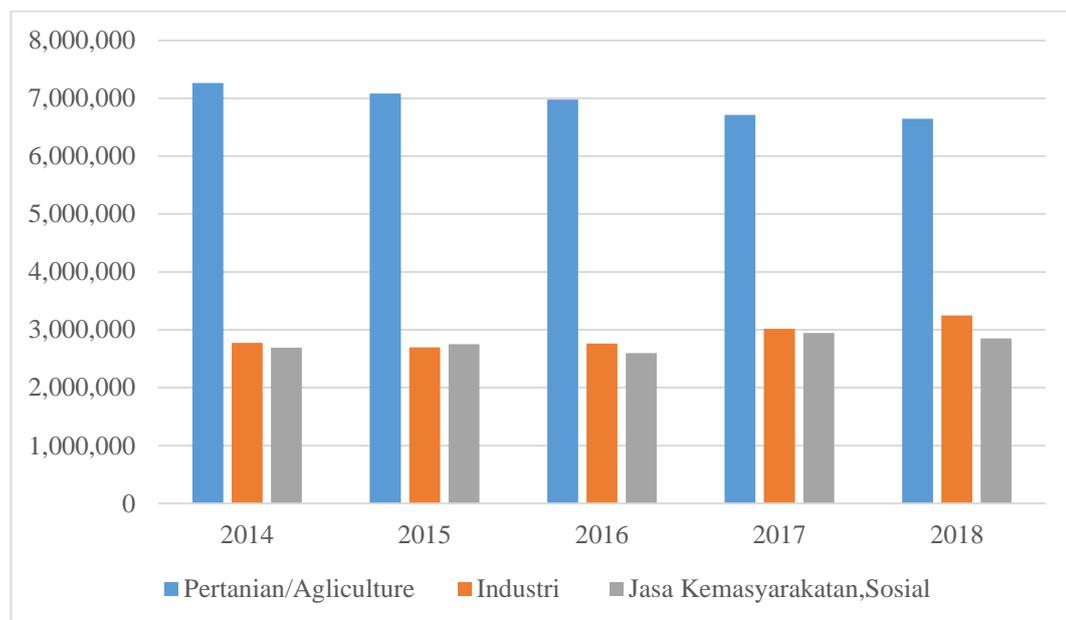
Menurut Todaro (2003:307) penyerapan tenaga kerja adalah “diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas dengan sebagai mana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja”. Berikut data jumlah penyerapan tenaga kerja sektor industri di 3 Provinsi 2014 – 2018.



Gambar 1.1 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di 3 Provinsi Tahun 2014 - 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2019 (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur bersifat fluktuatif. meskipun pada provinsi jawa barat dan provinsi jawa tengah bersifat fluktuatif juga tetapi Penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa timur yang dapat diserap lebih kecil dari provinsi jawa barat dan jawa tengah. Bisa dilihat pada tahun 2014 sampai 2018 provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang terkecil dalam hal penyerapan tenaga kerja dari sini bisa di simpulkan bahwa jawa timur mempunyai permasalahan tersendiri dalam penyerapan tenaga kerja disektor industri tersebut.



Gambar 1.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di 3 Sektor Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2019 (data diolah)

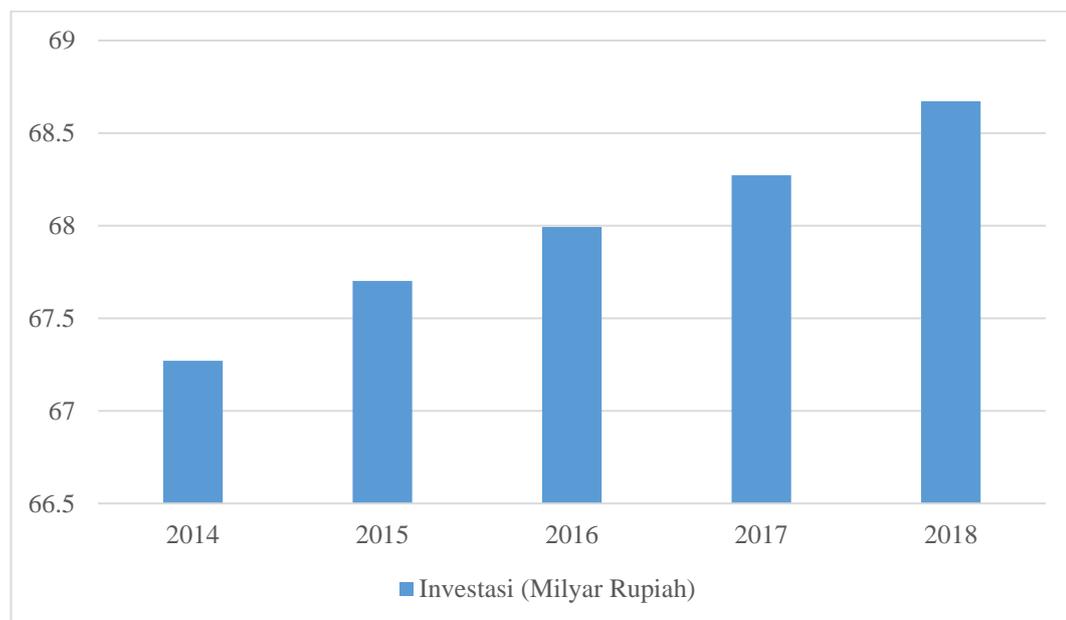
Gambar 1.2 Menunjukkan bahwa sektor yang paling besar tenaga kerja yang diserapnya adalah pertanian tetapi sektor tersebut juga tiap tahunnya mengalami penurunan tenaga kerja, sedangkan dua sektor lainnya mengalami fluktuatif yaitu ada kenaikan dan penurunan tenaga kerja yang diserap tiap tahunnya dengan demikian mengapa penulis mengambil sektor industri dikarenakan Menurut Arsyad

(2010:442), bahwa “pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor - sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. dalam hal ini apabila sektor industri mengalami kemajuan maka sektor yang lain akan ikut juga mengalami pertumbuhan yang baik karena sektor industri berperan untuk mrmajukan sektor yang lainnya.

Faktor lain yang dapat menyerap tenaga yaitu dengan investasi, investasi merupakan sebuah penanaman modal yang difokuskan terhadap satu sektor industri atau lebih yang dimasa mendatang diperkirakan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Sedangkan menurut (Halim, 2003:2), Investasi dapat juga didefinisikan sebagai “penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang”.

Menurut Sukirno (2004:108). Investasi dibagi menjadi 2 yaitu investasi yang terdorong (*Induced Investment*) dan investasi otonom (*Outonomous Investment*), Investasi yang terdorong (*Induced Investment*), yakni investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan permintaan, pertambahan permintaan yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan yang akan digunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada pertambahan permintaan maka, akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan

tersebut. Sedangkan investasi otonom (*Otonomous Investment*), yakni “investasi yang dilaksanakan atau dilaksanakan secara bebas, artinya investasi bukan karena penambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan”.



Gambar 1.3 Jumlah Investasi di Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018

Sumber: Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2019 (data diolah)

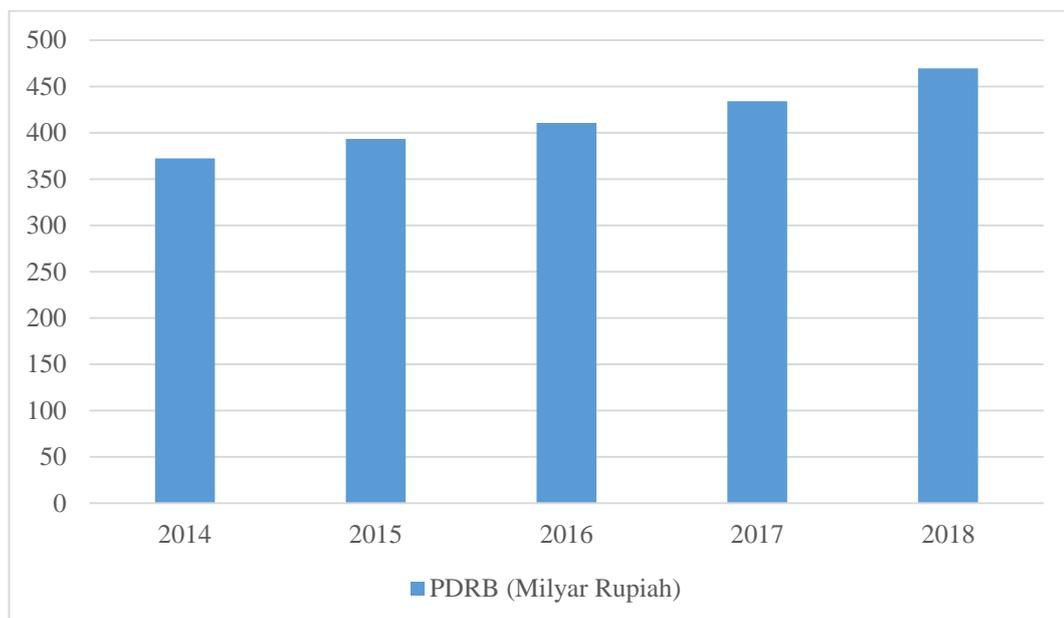
Gambar 1.3 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah investasi terhadap sektor industri. Berarti baik pemerintah maupun swasta masih memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi di sektor industri di Provinsi Jawa Timur, dengan demikian diharapkan dengan investasi yang terus naik setiap tahunnya maka lapangan pekerjaan maupun penyerapan tenaga kerja di

sektor industri bisa terserap dengan maksimal. Bahwa dalam hal ini investasi berpengaruh positif dalam penyerapan tenaga kerja. “Dengan kata lain apabila investasi meningkat maka peluang penyerapan tenaga kerja juga meningkat” (Abdul Haris Romdhoni, 2017:150).

Faktor lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan Produksi Domestik Regional Bruto. “salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai Produk Domestik Regional Bruto. dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto perkapita” (PDRB Perkapita) (Zarris, 1987:82). “PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Daryono” (1994:19-20) menyatakan Bahwa PDRB pada “hakikatnya menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu, meliputi seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah, sehingga PDRB secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan”.

Menurut BPS 2014, PDRB adalah “jumlah nilai tambah bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga bulan atau semesteran. Sedangkan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*Intermediate Cost*)”. Nilai tambah bruto mencakup

komponen-komponen Faktor pendapatan (upah, gaji, bunga sewa, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.



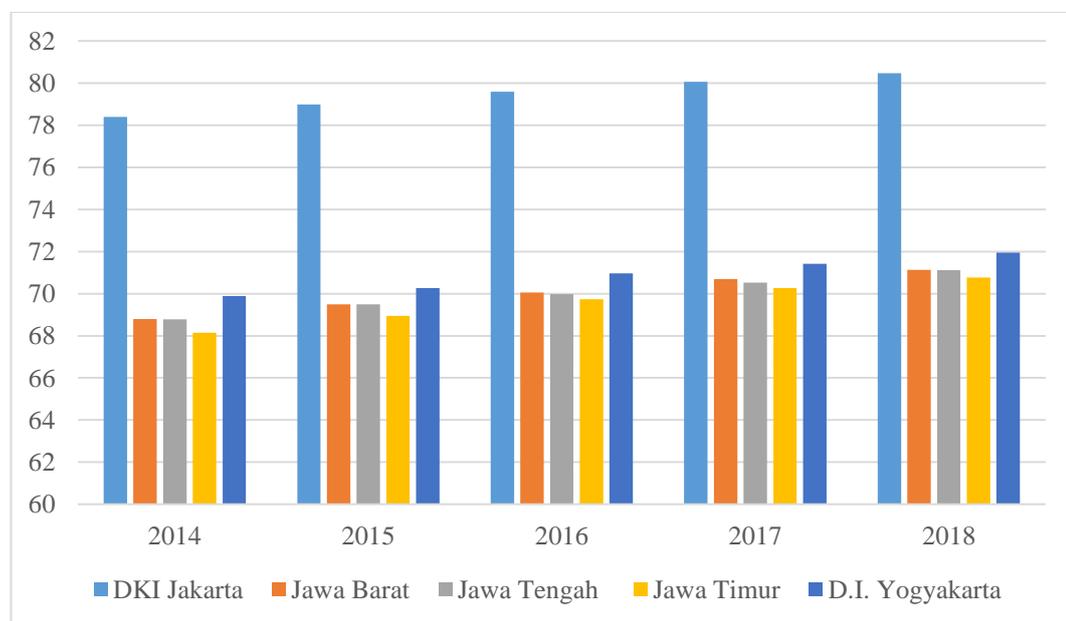
Gambar 1.4 Jumlah PDRB sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020 (data diolah)

Faktor lainnya adalah Indeks pembangunan manusia, hal ini sesuai dengan teori *Human Capital* yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan didalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sejak tahun 1999, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Indeks* atau disebut juga IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan

dan kehidupan yang layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang di kombinasikan. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Menurut Todaro dan Smith (2012) IPM adalah “indeks yang mengukur pembangunan ekonomi nasional sosial, didasarkan pada penggabungan tindakan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Baru (NHDI- *New Human Development Indeks*), dimaksudkan untuk mengatasi beberapa kritik dari IPM. Indeks masih didasarkan pada standar hidup, pendidikan, dan kesehatan”.

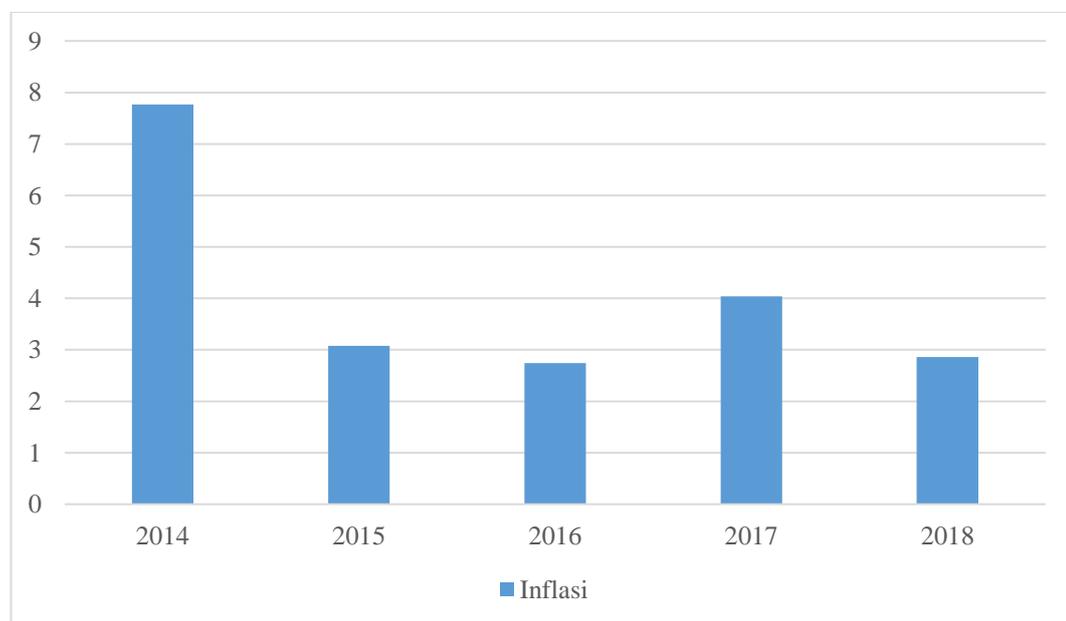


Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi yang ada di Pulau Jawa Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional 2020 (data diolah)

Faktor lainnya yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yaitu Inflasi, inflasi dapat didefinisikan dengan kenaikan harga barang atau jasa yang terus menerus dalam periode waktu tertentu biasanya periode waktunya bisa satu tahun atau lebih. “Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya”(Sadono Sukirno, 2001:15).

Boediono (2008:115) mendefinisikan “Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya”.



Gambar 1.6 Inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2018 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.6, bisa dilihat bahwa inflasi di Provinsi Jawa Timur sering mengalami fluktuasi, bahwa pada saat memasuki tahun 2014, tingkat inflasi

di Provinsi Jawa Timur sebesar 7,77 %, dan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur mulai terkendali pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, pada tahun 2015 sebesar 3,08% sedangkan 2016 sebesar 2,74%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan inflasi lagi menjadi sebesar 4,04% dan pada tahun 2018 inflasi mulai terkendali menjadi sebesar 2,86%. Berdasarkan data pada tabel 1.5 bisa dilihat pada tahun 2016 dan 2018 merupakan inflasi yang terendah di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Nanga (2005:248), “inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan penyerapan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi”. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen keinginan perusahaan untuk menambah output juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan mendorong terjadinya laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyper Inflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja berkurang sehingga pengangguran bertambah”.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi Sektor Industri, PDRB Sektor Industri, IPM dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 -2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penelitian ini maka diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi sektor industri, PDRB sektor industri, IPM dan inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagaimana pengaruh investasi sektor industri, PDRB sektor industri, IPM dan inflasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi sektor industri, PDRB sektor industri, IPM dan inflasi secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi sektor industri, PDRB sektor industri, IPM dan inflasi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan Manfaat:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Bagi Pemerintah

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi dinas tenaga kerja dalam memberikan kebijakan mengenai tenaga kerja kedepannya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan data sekunder yaitu dengan mencari informasi melalui website resmi BPS dan BPS Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur dalam angka yang menyajikan data valid.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilakukan diawal Bulan Februari 2020 dan diperkirakan akan selesai pada awal Bulan November 2020 secara rinci, jadwal dan tahapan kegiatan penelitian di tampilkan pada lampiran 1: